



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
DINAS KESEHATAN TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2022**

---

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan No 2416/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

Laporan Akuntabilitas merupakan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan melaporkan kegiatan dan pencapaian program kepada pimpinan dalam rangka penilaian kinerjanya. Laporan ini menggambarkan Kinerja Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai sasaran Rencana Strategi Dinas Kesehatan tahun 2020-2024.

Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di Dinas Kesehatan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras dan kerja cerdas seluruh pegawai, unit-unit lintas program dan lintas sektor terkait.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pada semua pihak yang telah mendukung seluruh kegiatan di Dinas Kesehatan tahun 2020. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan informasi, evaluasi, dan masukan bagi pengembangan perencanaan masa yang akan datang. Sekian dan Terima Kasih.

Sampang, 28 Februari 2022  
Kepala Dinas Kesehatan dan KB  
Kabupaten Sampang

Dr. ABDULLOH NAJICH, Sp.P., MM.

Pembina

NIP. 19750421 200604 1 012

---

## DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	1
: A. Struktur Organisasi	I-2
: B. Tugas dan Fungsi	I-3
: C. Isu Strategis	I-25
: D. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)	I-26
: E. Peta Proses Bisnis	I-51
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	II-1
: A. Rencana Strategis	II-1
: B. Perjanjian Kinerja	II-5
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
: A. Capaian Kinerja	III-1
: B. Realisasi Anggaran	III-12
BAB 4 : PENUTUP	IV-1
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Perubahan	
2. SK Tim SAKIP Dinas Kesehatan Kab. Sampang 2021	

---

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pembangunan bidang kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Selaras dengan tujuan tersebut maka daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan kesehatan yang ada di daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing daerah. Di Kabupaten Sampang, Dinas Kesehatan sebagai satu lembaga yang ada di daerah, maka wajib menyelenggarakan pembangunan kesehatan tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud.

Untuk melaksanakan pembangunan tersebut Dinas Kesehatan mempunyai kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah (SKD) yang disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Sampang telah ditetapkan ada 7 (tujuh) subsistem bidang kesehatan yaitu: 1) Upaya Kesehatan, 2) Pemberdayaan Masyarakat, 3) Sumber Daya Manusia Kesehatan, 4) Pembiayaan Kesehatan, 5) Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan Makanan, 6) Manajemen, Regulasi dan Informasi Kesehatan, 7) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Implementasi dari Sistem Kesehatan Daerah ini tertuang dalam rencana strategis Dinas Kesehatan berupa program dan kegiatan dengan indikator kinerja yang terukur. Secara rutin

---

tahunan hasil capaian kinerja tersebut akan dilakukan evaluasi dalam bentuk laporan kinerja.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan wajib kesehatan di Kabupaten Sampang mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan apakah telah memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021.

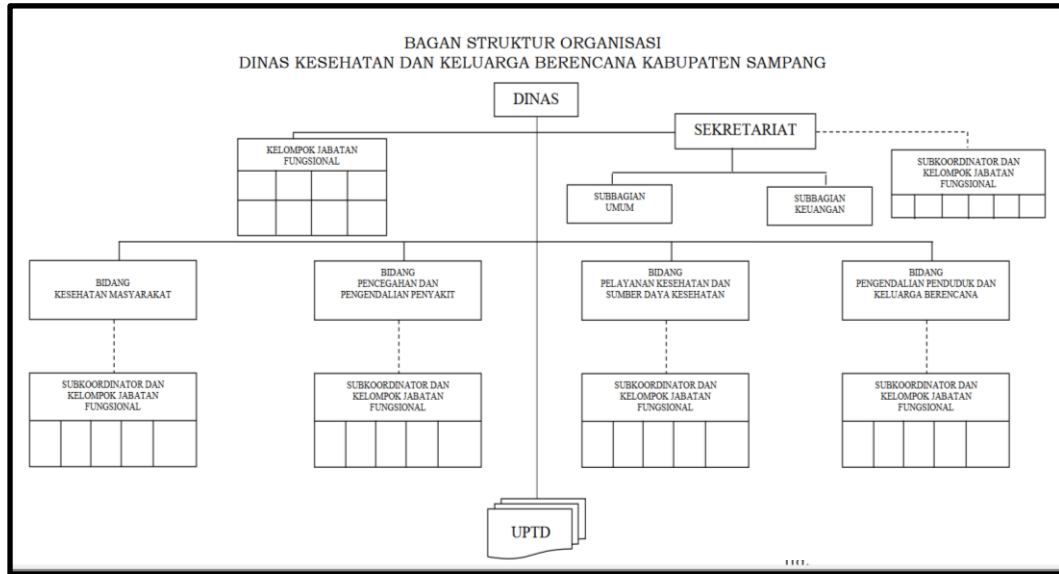
#### **A. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang mengacu kepada Peraturan Bupati Sampang No. 6 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang antara lain:

- 1) KEPALA DINAS
  - 2) SEKRETARIS, membawahi:
    - a. Sub Bagian Umum
    - b. Sub Bagian Keuangan
    - c. Kelompok jabatan fungsional
  - 3) BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, membawahi kelompok jabatan fungsional
  - 4) BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR, membawahi kelompok jabatan fungsional
  - 5) BIDANG PELAYANAN KESEHATAN Dan SUMBER DAYA KESEHATAN, membawahi kelompok jabatan fungsional
  - 6) BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, membawahi kelompok jabatan fungsional
  - 7) UOBK DINAS
  - 8) UPTD DINAS
    - a.
-

Gambar 1  
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang



## B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 6 Tahun 2022 Tanggal 7 Januari 2022 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Sampang dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Kesehatan dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang yaitu:

- a. perumusan kebijakan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang kesehatan, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas dan fungsi setiap struktur dalam organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
  - b. pengelolaan administrasi keuangan;
  - c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
  - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
  - e. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
  - f. pembinaan organisasi dan tatalaksana dinas;
  - g. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
  - h. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
  - i. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
  - j. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - k. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya;
  - l. pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan
  - m. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
-

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sekretaris dibantu oleh:

1. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
  - b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
  - c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
  - d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
  - f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
  - g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
  - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
  - b. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
  - c. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
  - d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## **2. Bidang Kesehatan Masyarakat**

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan

---



ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan operasional peningkatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, serta kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- b. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan bidang peningkatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, serta kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- c. pelaksanaan kebijakan operasional bidang peningkatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, serta kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang peningkatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, lingkungan, serta kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang peningkatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, serta kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, serta kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- g. pelaksanaan administrasi Bidang Kesehatan Masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

---

operasional bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan operasional bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- e. pelaksanaan administrasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **3. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan**

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya

---

kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan operasional bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

---

- a. perumusan kebijakan operasional bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan operasional bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- f. pelaksanaan administrasi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **C. Isu Strategis**

Isu strategis merupakan kondisi yang perlu diperhatikan berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal daerah Kabupaten Sampang. Analisis isu-isu strategis didefinisikan berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancaman.

Hasil analisa isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2021-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang antara lain:

- a. Masih tingginya Angka Kematian Ibu
  - b. Masih cukup tingginya angka kematian bayi
  - c. Masih banyaknya kasus balita gizi buruk
  - d. Meningkatnya prevalensi kusta
-

- e. Semakin banyaknya Angka Notifikasi Kasus pada TBC
- f. Insidence Rate penyakit DBD yang tinggi
- g. Prevalensi Hipertensi yang masih tinggi
- h. Prevalensi Diabetes Melitus semakin banyak
- i. Masih rendahnya Persentase Masyarakat yang menjadi Peserta JKN
- j. Kasus kondisi gagal tumbuh pada anak balita (*stunting*) masih cukup tinggi
- k. SDM Kesehatan yang belum sesuai standart
- l. Keterbatasan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

#### **D. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)**

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

---

Tabel. 1 Cascading

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia harapan hidup	1. Menurunnya angka kematian ibu dan bayi	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Persentase Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan UKP dan UKM	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan ibu hamil sesuai standar
				2. Angka Kematian Bayi (AKB)		2. Persentase pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Persentase RS Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan tingkat Kabupaten	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan	Jumlah ibu melahirkan yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu melahirkan sesuai standar
						3. Persentase Pelayanan ibu melahirkan			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi sesuai standar
						4. Persentase Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
						5. Persentase Pelayanan Kesehatan Balita			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						6. Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
						7. Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	Jumlah penduduk lansia yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
						8. Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar
						9. Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan DM sesuai standar
						10. Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan	Jumlah orang dengan risiko HIV yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	
						11. Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan gangguan Jiwa (ODGJ) Berat			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah frekuensi pelayanan promosi kesehatan
						12. Persentase Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah pelaksanaan surveilans kesehatan
						13. Persentase pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa/kelurahan yang sudah ODF
			2. Meningkatnya status gizi masyarakat	1. Persentase Balita Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Persentase Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan UKP dan UKM	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita stunting yang mendapatkan pelayanan gizi sesuai standar



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						2. Persentase pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Persentase RS Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan tingkat Kabupaten	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah sasaran yang diukur kebugarannya sesuai standar
						3. Persentase Pelayanan ibu melahirkan				
						4. Persentase Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir				
						5. Persentase Pelayanan Kesehatan Balita				
						6. Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				
						7. Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				
						8. Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia				
						9. Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						10. Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				
						11. Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				
						12. Persentase Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis				
						13. Persentase pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)				
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu berstatus Purnama dan Mandiri	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah frekuensi Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah frekuensi Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
							Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah posyandu berstatus purnama dan mandiri
			3. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1. Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Persentase Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan UKP dan UKM	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
				2. Persentase RS Daerah Terakreditasi		2. Jumlah kasus Covid-19 yang ditangani			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah pasien suspek TBC yang mendapatkan pemeriksaan TB sesuai standar

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3. Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) semua kasus TBC		3. Persentase sasaran penduduk yang telah divaksinasi Covid-19			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
				4. Angka prevalensi kusta		4. Persentase pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional dan akupuntur
				5. Angka prevalensi Covid-19		5. Persentase Pelayanan ibu melahirkan			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah frekuensi pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA
						6. Persentase Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah upaya kesehatan khusus yang dikelola
						7. Persentase Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kasus DBD yang ditangani sesuai standar

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						8. Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
						9. Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah pengambilan dan pengiriman spesimen potensial KLB ke laboratorium rujukan
						10. Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Tatanan Kabupaten/Kota Sehat yang dilakukan
						11. Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah penelitian kesehatan yang dikelola
						12. Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah penyediaan operasional pelayanan RS
						13. Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan gangguan Jiwa (ODGJ) Berat			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah penyediaan operasional pelayanan Puskesmas
						14. Persentase Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah penyediaan operasional pelayanan faskes lainnya

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						15. Persentase pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan reakreditasi Puskesmas
									Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah penyediaan operasional SPGDT/PSC 119
							Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah profil kesehatan kabupaten yang disusun
									Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah sistem informasi kesehatan yang dikelola
									Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah paket perangkat SIK dan jaringan internet yang dibeli

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan dan pembinaan tata kelola RS yang dilakukan
									Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah RS Daerah yang terakreditasi
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang Memenuhi Standar	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik aktif
									Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap izin praktik tenaga kesehatan yang dilakukan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen rencana kebutuhan (renbut) SDM Kesehatan yang disusun
									Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Puskesmas dan RS yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar
									Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan yang dilakukan
							Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi teknis



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah apotek, toko obat, toko alkes, optik, dan UMOT yang memiliki izin aktif
						Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan yang Memenuhi Standar	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah	Jumlah PIRT yang memiliki sertifikat dan izin produksi aktif

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Tangga	
						Persentase PIRT yang Memiliki Ijin	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi
			4. Meningkatnya kepuasan masyarakat di bidang kesehatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang kesehatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan yang disusun

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun
									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan yang disusun
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan
									Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBU yang disusun
									Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diberi label dan dicatat
									Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pembinaan dan pengawasan BMD yang dilakukan
									Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD yang disusun
							Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi pendapatan daerah	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen rencana PAD yang disusun
									Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan penerimaan PAD yang disusun
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi kepegawaian	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah paket sarana dan prasarana disiplin pegawai yang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										dibeli
									Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya yang dibeli
									Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian
									Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang dikelola
									Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monev dan penilaian kinerja pegawai yang dilakukan
									Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mendapatkan diklat pegawai
									Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang dibeli
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang dibeli
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan ATK
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah langganan media cetak
									Penyediaan Bahan/Material	Jumlah penyediaan bahan habis pakai perkantoran
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang diselenggarakan
									Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah paket pengadaan penunjang SPBE
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD penunjang urusan pemerintahan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan
									Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang dibeli
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket peralatan dan mesin lainnya yang dibeli
									Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dibangun
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket sarana dan prasarana gedung kantor yang dibeli

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik
									Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajaknya
									Pemeliharaan Mebel	Jumlah paket mebel yang dipelihara



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara
							Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase penyediaan pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah penyediaan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
2	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	1. Terkendalnya angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)	1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Kebijakan Pemerintah Kabupaten yang diselaraskan dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen GDPK yang disusun dan dimanfaatkan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan yang dilakukan
									Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga yang dilakukan
									Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah rapat pengendalian program KKBPK
							Persentase Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Kabupaten yang dipetakan		Pemetaan Kependudukan	Jumlah dokumen pemetaan kependudukan yang disusun
									Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem	Jumlah pembinaan dan pengawasan sistem

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Informasi Keluarga	informasi keluarga yang dilakukan
									Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah dokumen laporan hasil pemutakhiran data keluarga yang disusun
									Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen data dan informasi keluarga yang disusun
									Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah pencatatan dan pengumpulan data keluarga yang dilakukan
									Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah laporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB yang disusun
					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Semua Metode	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya	Advokasi Program KKBPk kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah frekuensi advokasi KKBPk kepada stakeholder dan mitra kerja

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Lokal		
									Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPk sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah frekuensi KIE program KKBPk sesuai kearifan lokal yang dilakukan
									Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPk	Jumlah paket sarana KIE program KKBPk yang diadakan dan didistribusikan
									Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah frekuensi promosi dan KIE program KKBPk melalui media

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPk melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah frekuensi rakorcam, rekordes, dan mminilok yang dilakukan
									Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk	Jumlah penyediaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPk
									Pengendalian Program KKBPk	Jumlah frekuensi pengendalian program KKBPk
							Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase tenaga PKB/PLBK yang didayagunakan	Pembinaan IMP dan Program KKBPk di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah frekuensi pembinaan IMP dan program KKBPk di lini lapangan yang dilakukan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah paket sarana pendukung operasional PKN/PLKB yang disediakan
									Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPk untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah frekuensi penyuluhan, penggerakan, pelayanan, dan pengembangan program KKBPk
									Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah frekuensi penggerakan IMP
							Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	Persentase Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah paket alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan yang didistribusikan ke faskes

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten	Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
									Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah frekuensi peningkatan kesertaan penggunaan MKJP
									Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah dokumen rencana kebutuhan alokon dan sarana penunjang pelayanan KB yang disusun
									Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah paket sarana penunjang pelayanan KB yang disediakan
									Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah frekuensi pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB yang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										dilakukan
									Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah frekuensi pembinaan pelayanan KB dan Kespro di faskes
									Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah frekuensi promosi dan konseling kespro yang dilakukan di faskes dan kelompok kegiatan
									Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah tenaga pelayanan KB yang mendapatkan peningkatan kompetensi



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah penyediaan dukungan operasional pelayanan KB bergerak
									Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah frekuensi peningkatan kesertaan KB Pria yang dilakukan
							Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah frekuensi koordinasi integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB
									Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah frekuensi pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB
									Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah frekuensi pembinaan terpadu kampung KB yang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										dilakukan
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Baduta Stunting	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibentuk

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah paket sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang diadakan
									Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan pelatihan teknis/orientasi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	Jumlah penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana ketahanan dan kesejahteraan keluarga
									Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)	Jumlah penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah frekuensi promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
									Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah frekuensi Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
									Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah dokumen materi IPK yang disusun

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah frekuensi advokasi dan promosi IPK
									Sosialisasi IPK	Jumlah frekuensi sosialisasi IPK
									Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah frekuensi koordinasi evaluasi pencapaian IPK
							Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	Jumlah Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang disusun

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah frekuensi Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
									Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Jumlah frekuensi pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,

---

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga/UPP KS)	BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga/UPP KS)
									Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah frekuensi Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

---



## **E. Peta Proses Bisnis**

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis. Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

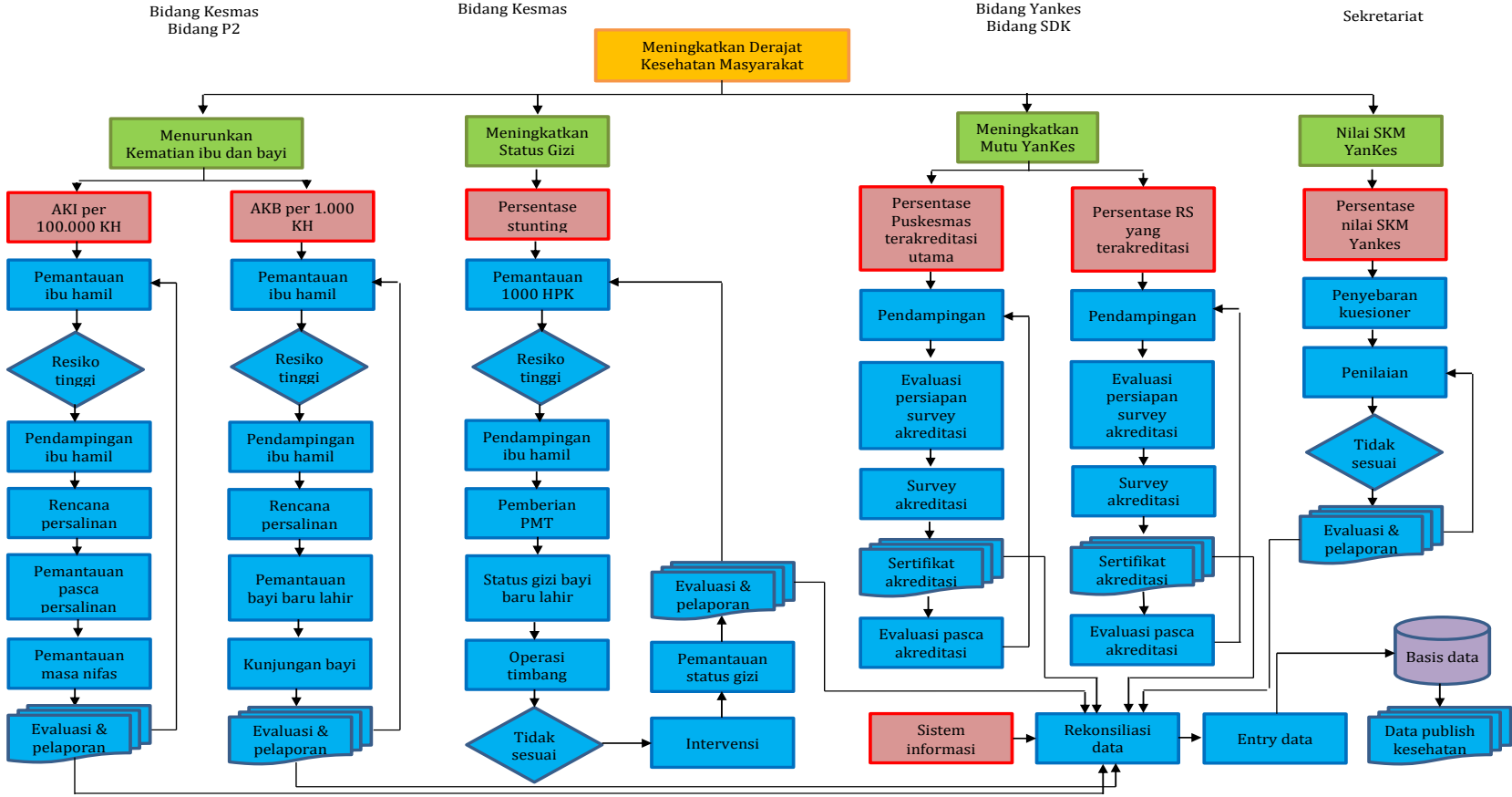
Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing–masing instansi pemerintah. Peta proses bisnis harus menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis sendiri merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Berikut Peta Proses Bisnis Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang :

---

PETA BISNIS DINAS KESEHATAN



## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Rencana Strategis**

Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang merupakan suatu perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Dinas Kesehatan yang mengedepankan isu-isu lokal dan merupakan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada.

Dalam menyusun perencanaan kinerja yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang mengikuti dan memperhatikan sasaran strategis dan indikator kinerja serta target yang telah ada di dalam Rencana Strategis.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2020 – 2024 ini berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 – 2024.

Keselarasan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2020 – 2024 terkait dalam Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

Dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah, dirumuskan suatu bentuk yang lebih terarah yaitu berupa tujuan dan sasaran di setiap perangkat daerah. Tujuan dan sasaran akan

---

menjadi dasar penyusunan kinerja selama lima tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan yaitu berupa *result* (hasil) yang ingin dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Berikut ini tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang:

*Tujuan: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat*

*Sasaran:*

*Sasaran 1 : Menurunnya Kematian Ibu dan bayi*

*Sasaran 2 : Meningkatnya Status Gizi*

*Sasaran 3 : Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan*

*Sasaran 4 : Nilai SKM Pelayanan Kesehatan*

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka didukung Program dan Kegiatan sebagai berikut:

**Sasaran 1 : Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi**

Indikator : Angka Kematian Ibu

Program :

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan :

- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota

**Sasaran 2 : Meningkatnya Status Gizi**

Indikator : Persentase stunting

Program :

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
- Program Pembinaan Keluarga Berencana
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Kegiatan :

---

- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

**Sasaran 3 : Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan**

Indikator : Persentase Puskesmas yang Terakreditasi minimal terakreditasi utama

Program :

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kegiatan :

---

- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
- Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi

Program :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan :

- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
- Peningkatan Pelayanan BLUD

**Sasaran 4 Nilai SKM Pelayanan Kesehatan**

Indikator : Persentase nilai SKM Kesehatan

Program :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
-

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.

Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan antar atasan dan bawahan menjadi kesepakatan yang mengikat untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berkualitas. Perjanjian penetapan kinerja sesuai dengan dokumen penetapan kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 yang telah ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Kesehatan. Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
1	Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi	1 Angka Kematian Ibu	79/100.000 kelahiran hidup
		2 Angka Kematian Bayi	6,1/1.000 kelahiran hidup
2	Meningkatnya Status Gizi	3 Persentase Stunting	17%
3	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	4 Persentase Puskesmas yang Terakreditasi minimal terakreditasi utama	30%
		5 Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi	100%
4	Nilai SKM Pelayanan Kesehatan	6 Persentase Nilai SKM Pelayanan Kesehatan	85%

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja

Sistem pengukuran kinerja merupakan suatu hal penting dalam pelaksanaan *good governance* untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam pencapaian kinerja organisasi. Pengukuran kinerja berhubungan dengan evaluasi program seperti audit kinerja, perencanaan strategis dan analisis kebijakan. Sampai sejauh ini pengukuran kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program di masing-masing organisasi perangkat daerah.

Akuntabilitas Kinerja diukur dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Formulir Capaian Indikator Kinerja Utama yang telah terisi, dilakukan verifikasi data internal guna menjaga keakuratan data tersebut. Sedangkan tanggung jawab pengumpulan data kinerja merupakan kewenangan masing-masing bidang di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang.

Adapun penanggung jawab data kinerja tiap-tiap Indikator Kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1 Penanggung Jawab Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	PJ
1	Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi	1 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Bidang Kesehatan Masyarakat
		2 Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	
2	Meningkatnya Status Gizi	3 Persentase Stunting	
3	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	4 Persentase Puskesmas yang Terakreditasi minimal terakreditasi utama	Bidang Pelayanan Kesehatan Bidang Sumber



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	PJ
		5 Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi	Daya Kesehatan
4	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	6 % SKM Pelayanan Kesehatan	Sekretariat

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Pengukuran kinerja meliputi perjanjian kinerja dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dan pengukuran kinerja dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, ditetapkan penilaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

85 Ke Atas	: Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$	: Berhasil
$55 \leq X < 70$	: Cukup Berhasil
$X < 55$	: Kurang Berhasil

#### 1. Capaian kinerja dibandingkan dengan target sasaran

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, perubahan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2021

Tujuan: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
1	Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi	1 Angka Kematian Ibu	79/100.000 kelahiran hidup	105,64/100.000 kelahiran hidup	66,28
		2 Angka Kematian Bayi	6,1/1.000 kelahiran hidup	3,99/1.000 kelahiran hidup	139,02
2	Meningkatnya Status Gizi	3 Persentase Stunting	17%	8%	164,65

Tujuan: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian
3	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	4 Puskesmas yang Terakreditasi minimal terakreditasi utama	30%	19,05%	63,5
		5 Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi	100%	50%	50
4	Nilai SKM Pelayanan Kesehatan	6 Persentase Nilai SKM Pelayanan Kesehatan	85%	81,25%	95,59

- a. Sasaran Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi pada indikator angka kematian ibu kinerjanya mencapai 139,02% atau kategori **SANGAT BERHASIL**. Untuk mencapai keberhasilan sasaran strategis ini didukung oleh Program Kesehatan Masyarakat. Beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan sasaran ini adalah: kompetensi petugas yang bagus dalam memberikan pelayanan bagi ibu hamil dan ibu nifas. Selain itu juga kepatuhan petugas dalam melakukan seluruh screening ibu hamil yaitu pemeriksaan ibu hamil dengan 10T. Melalui tahapan screening ini sejak dini sudah terdeteksi kondisi kehamilan ibu. Apabila ibu hendak bersalin dan tidak termasuk dalam penapisan, maka ibu akan segera di rujuk ke FKTL. Adanya kebijakan persalinan harus di fasilitas kesehatan juga berkontribusi besar dalam menurunkan angka kematian ibu.
- b. Sasaran Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi pada indikator angka kematian bayi kinerjanya mencapai 66,28% atau kategori **CUKUP BERHASIL**. Keberhasilan kinerja sasaran strategis ini didukung oleh Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Adanya kebijakan persalinan harus di fasilitas kesehatan juga berkontribusi besar dalam menurunkan angka kematian bayi, dikarenakan apabila ibu bersalin di fasilitas kesehatan, maka yang melayani persalinan bukan satu orang petugas kesehatan, tetapi oleh Tim VK FKTP serta dengan

peralatan yang lengkap, sehingga ibu dan bayi akan ditangani sesuai dengan prosedur. Selain itu juga faktor keberhasilan pada indikator ini adalah keberhasilan kemitraan bidan dukun, sehingga dukun tidak menolong persalinan, tetapi hanya melakukan perawatan ibu bersalin dan perawatan bayi.

- c. Sasaran meningkatnya status gizi dengan indikator persentase balita stunting capaian kinerja sebesar 164,65% atau kategori **SANGAT BERHASIL**. Keberhasilan kinerja sasaran strategis tersebut didukung oleh Program Kesehatan Masyarakat dan Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Kesehatan Kerja, dan Olah Raga. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan pada indikator ini, diantaranya ialah pemantauan ibu hamil sejak 1000 hari kehidupan dengan memantau status gizi ibu hamil dengan rutin, mulai dari pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, pemenuhan gizi seimbang bagi ibu hamil, serta pemberian informasi tentang gizi bagi ibu hamil dan bayi.
  - d. Sasaran strategis Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan memiliki pada indikator kinerja Persentase Puskesmas yang Terakreditasi minimal terakreditasi utama dengan capaian kinerja sebesar 63,5% atau kategori **CUKUP BERHASIL**. Keberhasilan kinerja sasaran strategis tersebut didukung oleh Program Pelayanan Kesehatan dan Program Sumber Daya Kesehatan. Kondisi Pandemi covid-19 menyebabkan tidak dilakukan survey reakreditasi Puskesmas.
  - e. Sasaran strategis Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan memiliki pada indikator kinerja Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi dengan capaian kinerja sebesar 50% atau kategori **KURANG BERHASIL**. Penyebab ketidakberhasilan indikator kinerja ini adalah dikarenakan tahun 2021 ada tambahan Rumah Sakit baru yaitu RSD Ketapang. Sasaran strategis indikator ini didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan. Beberapa faktor yang mendukung tercapainya kinerja
-

pada indikator sasaran ini adalah tersedianya sumber daya manusia sesuai standart kompetensinya serta pemenuhan sarana prasarana sesuai dengan standart sehingga mutu pelayanan yang diberikan berkualitas.

- f. Sasaran strategis Nilai SKM Pelayanan Kesehatan memiliki capaian kinerja sebesar 95,59% atau kategori **SANGAT BERHASIL**. Keberhasilan kinerja sasaran strategis tersebut didukung oleh Program Pembinaan Lingkungan Sosial , Program Manajemen Pelayanan Kesehatan, Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur, Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik. Tahun 2021 ini merupakan awal penilaian SKM secara online.

2. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Dalam melakukan pengukuran kinerja dapat dibandingkan dengan capaian yang telah dicapai tahun-tahun sebelumnya. Dengan melakukan perbandingan ini dapat diketahui seberapa banyak rata-rata peningkatan kinerja kita setiap tahunnya. Dengan demikian akan dapat diukur/ diketahui apakah capaian kinerja organisasi yang telah ditentukan dalam renstra dapat dicapai atau tidak diakhir periode renstra.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2017-2021

Sasaran/ Indikator Sasaran	Capaian				
	2018	2019	2020	2021	
1	Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi				
	- Angka Kematian Ibu	91,5	66,29	60,54	105,64
	- Angka Kematian Bayi	7,02	5,67	3,99	3,72
2	Meningkatnya status gizi				

	Persentase stunting	17,4	9,92	8	6,01
3	Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan				
	- Persentase Puskesmas yang Terakreditasi minimal terakreditasi utama	NA	19,05	19,05	19,05
	- Persentase Rumah sakit yang terakreditasi	100	100	50	50
4	Nilai IKM pelayanan kesehatan				
	- Persentase nilai IKM Pelayanan Kesehatan	82,80	82,76	84,76	81,25

Dari tabel diatas dapat dilakukan analisis sebagai berikut:

- a. Angka kematian ibu dari tahun 2018 mengalami penurunan kinerja, yaitu setiap tahun terjadi rata-rata peningkatan kematian 3,1/100.000 kelahiran hidup tiap tahun. Pada tahun 2019-2021 terjadi peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya.
- b. Angka kematian bayi mengalami peningkatan kinerja, yaitu setiap tahun rata-rata penurunan kematian bayi sebesar 8,27/1.000 kelahiran hidup tiap tahun dan tahun 2021 mengalami penurunan kinerja yang signifikan.
- c. Meningkatnya status gizi dengan indicator persentase balita stuntin dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan yang signifikan, artinya berdasarkan penilaian kinerja mengalami peningkatan kinerja.
- d. Persentase Puskesmas yang terakreditasi dengan minimal terakreditasi utama dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan kinerja. Hal ini dikarenakan pandemic covid menyebabkan tidak dilakukannya survey akreditasi pada Puskesmas.
- e. Persentase rumah sakit yang terakreditasi tahun 2021 mengalami penurunan kinerja. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 ini terdapat rumah sakit baru, yaitu RSD Ketapang yang belum terakreditasi.
- f. Nilai IKM pelayanan kesehatan dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan nilai IKM 2,6% pertahun. Sedangkan tahun 2021 mengalami

penurunan kinerja, dikarenakan penilaian dilakukan secara online, yang kemungkinan responden kurang paham terhadap item pertanyaan yang diberikan.

### 3. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target RPJMD

Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sampang, Dalam pelaksanaannya diharapkan menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam rangka pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang 2021-2024. Pelaksanaan kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran harus memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar beberapa sumber APBD yang diterima SKPD Dinas Kesehatan.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang 2021-2024 merupakan pedoman dan dasar dalam melaksanakan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Sampang. Untuk itu perlu ditetapkan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 3.4 Tabel Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Realisasi Capaian Tiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Target 2023	
1	Angka Kematian Ibu	91,5	66,29	60,54	79	105,64	73	67	67
2	Angka Kematian Bayi	7,02	5,67	3,99	6,1	3,72	5,4	4,88	4,57
3	Persentase stunting	17,4	9,92	8	17	6,01	16	15	14,5
4	Persentase Puskesmas yang terakreditasi minimal terakreditasi utama	NA	19,05	19,05	30	19,05	50	60	70

5	Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi	100	100	50	100	50	100	100	100
6	Persentase nilai IKM Pelayanan Kesehatan	82,80	82,76	84,76	85	81,25	86	87	88

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa di tahun pertama RPJMD terdapat beberapa indikator yang kemungkinan bisa dipastikan dapat dicapai sebelum akhir RPJMD.

a. Angka kematian ibu

Diperkirakan target indikator SKM pelayanan kesehatan harus dengan upaya yang keras untuk bisa memenuhi target setiap tahunnya. Mengingat capaian setiap tahunnya turun naik.

b. Angka kematian bayi

Angka kematian Ibu tahun pertama RPJMD telah mencapai 5,67/1.000 kelahiran hidup. Capaian akhir periode RPJMD sebesar 4,57/1.000 kelahiran hidup. Capaian ini sudah mendekati target RPJMD tahun keempat. Sehingga dapat diperkirakan diakhir periode RPJMD indikator AKB ini juga bisa jauh melebihi target akhir RPJMD.

c. Persentase Stunting

Persentase stunting tahun pertama RPJMD telah mencapai 9,92%. Capaian akhir periode RPJMD sebesar 14,5%. Capaian ini sudah melebihi target akhir RPJMD. Sehingga dapat diperkirakan diakhir periode RPJMD indikator persentase stunting ini juga bisa jauh melebihi target akhir RPJMD.

d. Persentase Puskesmas yang terakreditasi minimal terakreditasi utama

Indikator ini diawal tahun RPJMD sudah mencapai 19,05%. Angka ini mendekati target RPJMD tahun kedua. Diperkirakan indikator ini juga bisa memenuhi target akhir RPJMD.

e. Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi

Indikator ini sudah pasti dapat mencapai target akhir RPJMD,



dengan capaian 100%. Meskipun capaian tahu ini hanya 50%, yang disebabkan adanya tambahan Rumah Sakit Ketapang yang belum terakreditasi, tetapi tahun 2021 akan dilakukan penilaian akreditasi untuk Rumah Sakit Ketapang.

f. Nilai SKM Pelayanan Kesehatan

Diperkirakan target indikator SKM pelayanan kesehatan harus dengan upaya yang keras untuk bisa memenuhi target setiap tahunnya. Mengingat capaian setiap tahunnya turun naik.

4. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target nasional

Dari empat indikator sasaran dengan enam indikator yang telah ditentukan, ada beberapa indikator kinerja yang memiliki target nasional. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target nasional disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.5 Tabel Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Indikator Propinsi dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Target		
		Kabupaten (realisasi 2021)	Propinsi	Nasional
1	Menurunnya kematian ibu dan bayi			
	Angka Kematian Ibu	105,64	91,45	305
	Angka Kematian Bayi	3,72	13,4	24
2	Meningkatnya status gizi			
	Persentase stunting	6,01	26,2	27,67
3	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan			
	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi minimal terakreditasi utama	19,05	21	8,13
	Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi	50		
4	Nilai SKM Pelayanan Kesehatan			
	Persentase nilai SKM Pelayanan Kesehatan	81,25		

Dari tabel diatas dapat diketahui ada 4 indikator yang memiliki target propinsi dan nasional.

Dari indikator tersebut seluruhnya sudah mencapai target propinsi dan nasional. Bahkan capaian kabupaten jauh melebihi target propinsi dan nasional yang ditentukan.

#### 5. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja maka akan dilakukan beberapa upaya atau rencana tindak lanjut untuk lebih meningkatkan kinerja atau minimal mempertahankan kinerja yang sudah bagus ini. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan peran aktif lintas sektor secara terpadu dalam program kesehatan untuk peka terhadap kondisi kesehatan lingkungannya dan aktif dalam ikut mendukung program kesehatan, seperti mendukung ibu bersalin ke tenaga kesehatan, ibu dan balita rutin berkunjung ke posyandu dan program kesehatan lainnya.
- b. Melengkapi kebutuhan sarana prasarana di FKTP dan FKTL khususnya sarana prasarana untuk pelayanan ibu bersalin dan bayi sebagai prioritas utama untuk menurunkan kematian ibu dan bayi.
- c. Perubahan pendekatan menjadi pendekatan keluarga melalui kunjungan rumah aktif oleh tenaga kesehatan khususnya bagi keluarga beresiko (keluarga yang memiliki lansia, bayi, balita, ibu hamil, dan penyakit kronis) serta mendorong keluarga untuk aktif dalam mengikuti kegiatan kesehatan.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Agar dapat mewujudkan target sasaran strategis yang telah ditetapkan, tentunya dibutuhkan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang upaya pencapaian target sasaran strategis. Besaran anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis disajikan dalam tabel berikut.

---

Tabel 3.6 Alokasi anggaran program dan kegiatan dalam pencapaian indikator sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran		
		Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian
1	Menurunnya kematian ibu dan bayi			
a	Angka Kematian Ibu	117.624.584.967	95.619.538.568	81,29
b	Angka Kematian Bayi	224.129.510	196.466.184	87,65
2	Meningkatnya status gizi			
a	Persentase stunting	12.162.054.188	7.005.489.966	57,6
3	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan			
a	% Puskesmas yang Terakreditasi minimal terakreditasi utama	47.782.842.056	43.489.817.716	91,05
b	% Rumah sakit yang terakreditasi	92.441.216.094	73.073.537.431	79,05
4	Nilai IKM pelayanan kesehatan			
a	% Nilai IKM pelayanan kesehatan	85.859.634.390	79.515.067.139	92,61
<b>Jumlah</b>		<b>389.792.328.980</b>	<b>321.976.651.728</b>	<b>82,6</b>

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penyerapan anggaran program/kegiatan sebesar 82,6%. Sedangkan alokasi anggaran terbesar adalah pada sasaran menurunnya kematian ibu dan bayi pada indikator angka kematian ibu, yaitu sebesar Rp. 117.624.584.967 atau 30,18% dari total anggaran yang terealisasi sebesar 81,29%. Alokasi anggaran terendah adalah pada indikator sasaran menurunnya angka akematian bayi, yaitu sebesar Rp. 224.129.510 atau 0,06% dari total anggaran dan terealisasi sebesar 87,65%.

Selanjutnya akan dilakukan pengukuran tingkat efisiensi penggunaan anggaran. Pengukuran tingkat efisiensi ini merupakan selisih capaian realisasi kinerja dengan capaian realisasi keuangan pada sasaran strategis. Berikut ini tingkat efisiensi masing-masing

Sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang pada Tahun 2021.

Tabel 3.7 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian	
1	Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi							
a	Angka Kematian Ibu	79	105,64	66,28	117.624.584.967	95.619.538.568	81,29	81,48
b	Angka Kematian Bayi	6,1	3,72	139,02	224.129.510	196.466.184	87,65	158,6
2	Meningkatnya Status Gizi							
a	Persentase stunting	17	6,01	164,65	12.162.054.188	7.005.489.966	57,6	286,34
3	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan							
a	% Puskesmas yang Terakreditasi minimal terakreditasi utama	30	19,05	63,5	47.782.842.056	43.489.817.716	91,05	69,74
b	% Rumah sakit yang terakreditasi	100	50	50	92.441.216.094	73.073.537.431	79,05	63,25
4	Nilai SKM pelayanan kesehatan							
a	% Nilai SKM pelayanan kesehatan	83	81,25	95,59	85.859.634.390	79.515.067.139	92,61	103,21

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan jika dibandingkan antara capaian kinerja yang dihasilkan dengan anggaran yang diserap adalah efisien dalam penggunaan anggaran, artinya bahwa nilai realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Hal ini dikarenakan dalam menentukan kegiatan benar-benar dipilih kegiatan yang memberikan pengaruh langsung terhadap capaian kinerja sasaran strategis, sehingga anggaran yang digunakan pun akan efisien.

Sedangkan berdasarkan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2021 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, anggaran dan realisasi pelaksanaan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang sebagai berikut:

Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi PAD Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2021

No.	Uraian	Capaian Kinerja		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
<b>1.</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>137.508.720.966,00</b>	<b>127.579.129.750,20</b>	<b>92,78</b>
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	18.603.015.300,00	12.249.822.533,00	65,85
b.	Dana Kapitasi JKN Puskesmas	48.905.705.666	43.335.903.865,00	88,61
c.	Pendapatan BLUD	70.000.000.000,00	71.993.403.352,20	102,85
<b>2.</b>	<b>Belanja</b>	<b>389.792.328.980,00</b>	<b>321.976.651.728,00</b>	<b>82,6</b>

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Kesehatan 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan bidang kesehatan Kabupaten Sampang diperoleh dari sumber Dana retribusi pelayanan kesehatan, kapitasi JKN Puskesmas dan BLUD Rumah Sakit. Retribusi pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk biaya operasional rutin Puskesmas, pendapatan Kapitasi JKN dimanfaatkan oleh Puskesmas sebagai belanja Jasa Pelayanan Medis dan Jasa Operasional Puskesmas melalui DPA Puskesmas masing-masing. Sedangkan pendapatan BLUD dibelanjakan oleh Rumah Sakit untuk kegiatan-kegiatan Rumah Sakit yang tidak dianggarkan melalui DAU serta untuk belanja pegawai Rumah Sakit termasuk untuk membayar gaji pegawai BLUD.

Pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang didukung oleh Program dan Kegiatan yang telah direncanakan. Kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan didukung oleh realisasi keuangan yang baik oleh masing-masing bidang dan seksi. Berikut ini realisasi keuangan Program dan Kegiatan di Dinas Kesehatan Kab. Sampang pada Tahun 2021.

Tabel 3.9 Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kab. Sampang Tahun 2021

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>167.063.398.371</b>	<b>142.657.589.007</b>	<b>85,39</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.222.560	62.994.645	92,34
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.568.754	33.508.820	86,88
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.564.642	7.560.440	99,94
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.565.363	4.548.857	99,64
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.805.000	3.800.220	99,87
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.927.500	3.927.008	99,99
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.791.301	.649.300	98,55
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	83.626.898.194	77.693.580.076	92,91
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	83.554.192.365	77.621.568.476	92,9
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	68.634.565	67.955.000	99,01
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.040.632	2.032.980	99,63
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.030.632	2.023.620	99,65
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.500.000	16.452.203	100
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	16.500.000	16.452.203	99,71
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.040.000	37.440.000	98
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	38.040.000	37.440.000	98,42
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	715.225.602	456.878.655	63,88
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.994.426	14.946.281	99,68
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.122.676	37.064.807	82,14
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	126.316.500	121.372.324	96,09

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.280.000	3.780.000	71,59
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	523.512.000	279.715.243	53,43
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	496.279.300	495.826.000	99,91
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	318.000.000	318.000.000	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	164.719.300	164.326.000	99,76
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.560.000	13.500.000	99,56
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	420.983.257	319.527.161	75,9
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	270.000	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	236.913.257	181.276.391	76,52
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	183.800.000	138.250.770	75,22
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.619.489	110.879.446	40,82
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000	60.903.446	40,6
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.600.000	49.976.000	76,18
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.019.489	-	0
	Peningkatan Pelayanan BLUD	81.409.629.969	63.248.265.768	77,69
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	81.409.629.969	63.248.265.768	77,69
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>203.543.589.965</b>	<b>166.822.398.411</b>	<b>81,96</b>
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	2.511.880.000	2.426.088.152	96,58
	Pembangunan Puskesmas	15.460.998.975	15.351.531.736	99,29
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.096.226.311	1.683.394.769	80,31

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	2.127.175.000	2.106.891.777	99,05
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	213.735.569	212.748.896	99,54
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.758.269.330	2.646.772.073	95,96
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.104.006.824	709.381.314	64,26
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.304.137.971	2.086.433.136	90,55
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.413.690.966	7.619.313.697	90,56
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibras	102.810.083	-	0
	Pengadaan Obat, Vaksin	2.847.775.093	2.758.382.768	96,86
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.539.346.400	2.510.397.100	98,86
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	207.356.728	145.584.400	70,21
	Distribusi Alat Kesehatan Lainnya Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	89.703.657	67.893.100	75,69
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.256.081.277	1.039.697.596	82,77
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan	5.148.517.318	5.120.277.950	99,45
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	17.450.424	15.181.964	87
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	206.679.086	181.284.220	87,71
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	224.288.126	172.445.710	76,89
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	55.550.041	41.363.761	74,46
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lansia	49.010.250	20.660.214	42,15
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	36.362.732	25.676.114	70,61
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	8.736.233	7.128.400	81,6
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	109.696.977	83.975.639	76,55
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	166.631.415	123.371.750	74,04



No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	54.432.763	21.629.800	39,74
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	5.018.596.624	2.531.283.444	50,44
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	26.109.546.479	14.945.208.918	57,24
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.105.411.461	1.664.541.045	79,06
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	255.638.430	140.949.830	55,14
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	737.021.270	612.774.986	83,14
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	842.962.303	648.013.239	76,87
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	37.473.925	16.967.644	45,28
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	857.948.274	384.387.921	44,8
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	111.770.861	68.437.640	61,23
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	23.600.000	-	0
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.695.850.342	1.103.254.725	65,06
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	75.434.504.017	68.958.458.535	91,42
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	37.199.903	25.579.011	68,76
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	219.727.710	176.008.980	80,1
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	8.544.751.842	7.007.624.498	82,01
	Operasional Pelayanan Puskesmas	24.437.083.638	15.880.306.521	64,98
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	192.021.404	182.939.704	95,27
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	367.170.000	-	0
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	8.510.808	4.504.000	52,92
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	3.720.000	1.360.000	36,56

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	2.780.624.900	2.682.963.283	96,49
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	61.436.152	60.250.719	98,07
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	300.910.830	286.870.900	95,33
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	253.745.272	135.811.000	53,52
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.124.243.685	2.035.944.708	95,84
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	871.570.286	90.451.124	10,38
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>9.747.594.232</b>	<b>7.697.984.727</b>	<b>78,97</b>
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	9.226.522.335	7.444.667.937	80,69
	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	8.424.077	8.390.641	99,6
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	5.999.450	5.998.120	99,98
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	4.997.140	4.884.040	97,74
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	9.177.105.780	7.395.965.171	80,59
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	29.995.888	29.429.965	98,11
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	521.071.897	253.316.790	48,61
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	521.071.897	253.316.790	48,61
	<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>205.865.988</b>	<b>105.743.900</b>	<b>51,37</b>

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	205.865.988	105.743.900	51,37
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	143.326.297	71.260.300	49,72
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	449.691	300.000	66,71
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	62.090.000	34.183.600	55,05
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>1.903.614.695</b>	<b>1.608.774.192</b>	<b>84,51</b>
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	980.515.298	798.748.375	81,46
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	980.515.298	798.748.375	81,46
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	471.925.703	471.556.423	99,92
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	471.925.703	471.556.423	99,92
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	451.173.694	338.469.394	75,02
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	451.173.694	338.469.394	75,02
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>18.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Persentase Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Kabupaten yang dipetakan	18.200.000	0	0
	Penyediaan dan pengolahan data Kependudukan	18.200.000	0	0
	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	<b>6.186.169.160</b>	<b>2.149.419.423</b>	<b>34,75</b>
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	<b>1.379.201.694</b>	<b>253.257.263</b>	<b>18,36</b>
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-	-	0
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	186.394.152	67.090.000	35,99
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.027.807.542	33.667.263	3,276
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	165.000.000	152.500.000	92,42
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.588.800.000	676.000.000	42,55
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	165.000.000	152.500.000	92,42
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	531.000.000	523.500.000	98,59
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	892.800.000	-	0
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.659.251.779	1.189.931.160	44,75
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	70.520.132	41.685.550	59,11
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.488.827.254	117.942.080	7,922
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.099.904.393	1.030.303.530	93,67

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	-	-	0
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	-	-	0
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	723.915.687	183.181.000	25,3
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	723.915.687	183.181.000	25,3
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>1.123.896.569</b>	<b>934.742.067</b>	<b>83,17</b>
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.123.896.569	934.742.067	83,17
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	484.593.232	402.435.880	83,05
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	7.463.500	7.407.080	99,24
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	14.400.000	14.400.000	100
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	607.396.837	501.146.787	82,51
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10.043.000	9.352.320	93,12
		<b>89.792.328.980</b>	<b>21.976.651.728</b>	<b>82,6</b>

\*Anggaran Setelah Perubahan

Tabel di atas menunjukkan bahwa untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis yang diharapkan telah dilaksanakan 23 Program dan 93 Kegiatan yang secara keuangan realisasinya rata-rata 82,6%. Persentase realisasi ini termasuk kategori baik.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2021 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi, alat pertanggungjawaban, dan peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang. Setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang telah mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan hasil evaluasi internal baik secara triwulanan dan tahunan yang telah disusun dalam LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2021 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pada indikator Angka Kematian Ibu capaian kinerjanya yaitu 66,28% atau kategori CUKUP BERHASIL
2. Sasaran strategis pada indikator Angka Kematian Bayi capaian kinerjanya yaitu 139,02% atau kategori SANGAT BERHASIL
3. Sasaran strategis Meningkatnya Status Gizi dengan indikator Persentase Stunting capaian kinerjanya yaitu 164,65% atau kategori SANGAT BERHASIL
4. Sasaran strategis Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dengan indikator Persentase Puskesmas yang terakreditasi minimal terakreditasi utama capaian kinerjanya yaitu 63,5% atau kategori CUKUP BERHASIL
5. Sasaran strategis Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dengan indikator Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi capaian kinerjanya yaitu 50% atau kategori KURANG BERHASIL
6. Sasaran strategis Nilai SKM Pelayanan Kesehatan capaian kinerjanya yaitu 95,59% atau kategori SANGAT BERHASIL

Sedangkan berdasarkan efisiensi antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang diperoleh adalah sebagai berikut:

---

1. Sasaran strategis pada indikator Angka Kematian Ibu tingkat efisiensi belanjanya sebesar 81,84% dan dikategorikan CUKUP EFISIEN.
2. Sasaran strategis pada indikator Angka Kematian Bayi tingkat efisiensi belanjanya sebesar 158,6% dan dikategorikan SANGAT EFISIEN.
3. Sasaran strategis Meningkatnya Status Gizi dengan indikator Persentase Stunting tingkat efisiensi belanjanya sebesar 286,34% dan dikategorikan SANGAT EFISIEN.
4. Sasaran strategis Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dengan indikator Persentase Puskesmas yang terakreditasi minimal terakreditasi utama tingkat efisiensi belanjanya sebesar 69,74% dan dikategorikan CUKUP EFISIEN.
5. Sasaran strategis Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dengan indikator Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi tingkat efisiensi belanjanya sebesar 63,25% dan dikategorikan CUKUP EFISIEN.
6. Sasaran strategis Nilai SKM Pelayanan Kesehatan tingkat efisiensi belanjanya sebesar 103,21% dan dikategorikan SANGAT EFISIEN.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan dan kendala yang dijumpai baik bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu akan dilakukan upaya peningkatan kinerja di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang, pembangunan budaya kerja yang kondusif, penegakan disiplin pegawai, dan mengoptimalkan setiap sumber daya yang dimiliki dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Tahun 2020-2024.

Sampang, 28 Februari 2022  
Kepala Dinas Kesehatan dan KB  
Kabupaten Sampang

Dr. ABDULLOH NAJICH, Sp.P., MM.  
Pembina  
NIP. 19750421 200604 1 012

---